

# ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke 4 Maret 2021 (19-25 Maret 2021)

## PENGESAHAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021 DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI

Monika Suhayati, S.H., M.H.  
Peneliti Madya/Hukum Perdata  
monika.suhayati@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

### ISU ATAU PERMASALAHAN

DPR RI telah mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021 pada 23 Maret 2021. 33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR RI, 10 RUU usulan Pemerintah, dan dua RUU usulan DPD RI. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam laporannya menyampaikan DPR RI telah menerima usulan sebanyak 61 RUU dengan perincian 42 RUU diusulkan komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat; 13 RUU diusulkan Pemerintah; dan enam RUU diusulkan DPD RI. Parameter terhadap usulan RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Tahun 2021 yaitu RUU yang tahap pembicaraan sudah masuk di tingkat I, RUU yang menunggu Surat Presiden, dan RUU yang sudah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Baleg DPR RI. Parameter lainnya yaitu, RUU yang tengah menjalani tahap harmonisasi, RUU yang dalam tahap penyusunan dan telah tersedia draf dan naskah akademik, serta terakhir, RUU usulan baru yang tercantum pada Prolegnas 2020-2024 yang memiliki urgensi tertentu.

Sebelumnya pada 14 Januari 2021, seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sudah diputuskan dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI. Dalam perkembangannya pada 9 Maret 2021, Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI memutuskan menarik RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 berdasarkan surat dari Pimpinan Komisi II DPR RI selaku pengusul RUU tersebut, dan mengganti RUU Pemilu dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Menanggapi pengesahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan sisa waktu dalam tahun 2021 yang terbatas, DPR RI dan Pemerintah diharapkan membahas RUU yang krusial dan bersentuhan langsung dengan publik, misalnya RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU tentang Wabah, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut Direktur Indonesian *Parliamentary Center* Ahmad Hanafi, dengan waktu yang sangat terbatas untuk membahas legislasi pada tahun ini, yang terpenting adalah peningkatan kualitas legislasi dengan proses pembahasan lebih demokratis. Untuk sampai pada proses pembahasan yang lebih demokratis, ruang keterlibatan publik harus dibuka luas dan setiap aspirasi publik dalam masa reses pun harus diperjuangkan.

### SUMBER

www.dpr.go.id, Republika, Media Indonesia, Kompas, 24 Maret 2021.